

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

- Tahun Sidang : 2019-2020
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke- : 13
- Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juli 2020
- Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : 1. *Progress Report* mengenai Pelaksanaan Program Strategis Kementerian terkait Dampak Pandemi COVID-19;  
2. Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI; dan  
3. Isu-isu Aktual.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 49 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
16. Ir. Hartono, M.Sc. (Sekretaris Badan Restorasi Gambut);
17. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani);
18. Ir. Agus Setya Prastawa, M.B.A. (Direktur Utama PT Inhutani I);
19. Ir. Sangudi Muhamad, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani II);
20. Ir. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III);
21. Ir. Andi Purwadi, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani IV); dan
22. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani V).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas *Progress Report* mengenai Pelaksanaan Program Strategis Kementerian terkait Dampak Pandemi COVID-19, Tindak Lanjut Kesimpulan Rapat Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan percepatan realisasi APBN Tahun 2020 guna pelaksanaan tugas percepatan penanggulangan dampak Pandemi COVID-19, disamping tugas pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta mengelola dan melestarikan hutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pelaksanaan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing-masing provinsi dapat didukung melalui pelimpahan Dana Dekonsentrasi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan membantu mendorong alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Badan Anggaran DPR RI.
3. Komisi IV DPR RI mendorong agar RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja dapat mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan bidang kehutanan kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk selanjutnya dapat didelegasikan kepada Daerah sebagai pemangku kewenangan di tingkat tapak, dalam rangka mengelola dan melestarikan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara bertahap menurut kapasitas kelembagaan di daerah.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelibatan petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelenggaraan karantina tumbuhan dan hewan langka dilindungi, pada setiap pintu pemasukan dan pintu pengeluaran satwa liar di seluruh wilayah Indonesia.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan pencegahan dan penanggulangan *illegal logging*.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menertibkan pemberian izin keluar masuk ke dalam Kawasan Hutan yang memiliki sumber daya hayati serta kearifan lokal bagi peneliti luar negeri dan tidak dibenarkan membawa keluar sampel penelitian dalam bentuk apapun tanpa izin.
7. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian atas izin pengelolaan Wisata Kampung Adat Baduy di Provinsi Banten, mengingat adanya kekhawatiran akan terganggunya kearifan lokal Masyarakat Hutan Adat Baduy serta mengambil langkah-langkah dalam upaya menjaga dan melestarikan salah satu warisan budaya nusantara dan melaporkan kepada Komisi IV DPR RI.
8. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menetapkan dan memindahkan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari Kota Medan ke Kota Banda Aceh.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151